

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera dan Jawa Tahun 2018-2022

Naila Maharani¹, Maria², Rosy Armaini³

¹Politeknik Negeri Sriwijaya, naila.mhrni08@gmail.com

²Politeknik Negeri Sriwijaya, mariamarduji@polsri.ac.id

³Politeknik Negeri Sriwijaya, rosyarmaini@polsri.ac.id

ABSTRAK

Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera dan Jawa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Laporan Realisasi Anggaran Provinsi di Sumatera dan Jawa periode 2018-2022. Sampel yang diperoleh sebanyak 15 provinsi dari 16 provinsi yang ada di Sumatera dan Jawa. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Analisis data menggunakan aplikasi Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of identifying the influence of local original income, general allocation funds and capital expenditure on the financial performance of regional governments in Sumatra and Java. The population used in this research is the Provincial Budget Realization Report in Sumatra and Java for the 2018-2022 period. The samples obtained were 15 provinces from 16 provinces in Sumatra and Java. The data that has been collected is analyzed using descriptive statistical analysis methods, panel data regression analysis, classical assumption tests, and hypothesis testing. Data analysis uses the Eviews 12 application. The results of this research show that Regional Original Income and Capital Expenditures partially have a positive and significant effect on the financial performance of the Regional Government, while the General Allocation Fund partially has no effect on the Financial Performance of the Regional Government. Regional Original Income, General Allocation Funds, and Capital Expenditures simultaneously have a positive and significant effect on Regional Government Financial Performance.

Keywords : *Regional Original Income, General Allocation Funds, Capital Expenditures, Regional Government Financial Performance.*

A. PENDAHULUAN

Hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengawasi dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan otonomi daerah. Kekuasaan yang lebih besar untuk menangani seluruh aspek pemerintahan, termasuk perencanaan, pembangunan, pengendalian, dan penilaian, telah diberikan kepada pemerintah daerah. Untuk membangun dan mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah harus memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki daerahnya. Kita harus mengevaluasi seberapa baik keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan mengembangkan daerahnya agar dapat memahami sejauh mana upaya yang dilakukan dalam hal ini.



Menurut Permendagri No.13 Thn 2006, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan fokus pada keadilan, kepatuhan, dan kemaslahatan masyarakat. Jika pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif dan sejalan dengan peraturan hukum saat ini, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat meningkat.

Kinerja keuangan pemda ialah salah satu indikator kemampuan daerah dalam menerapkan undang-undang pengelolaan dana secara benar dan akurat guna mempertahankan layanan dengan baik. Analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Analisis ini berfokus pada aspek-aspek yang mungkin menjadi kesenjangan penting dalam optimalisasi keuangan daerah.

Rasio kemandirian yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasional pemerintahannya digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbandingan pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi digunakan untuk menentukan rasio kemandirian suatu daerah. Berikut ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Transfer, anggaran tahun 2018–2022.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Tahun 2018-2022

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera (%)

Thn	Aceh	Sumut	Sumbar	Riau	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Kep. Babel	Kep. Riau
2018	20	80	57	75	60	63	44	101	50	54
2019	21	79	58	69	56	61	39	113	47	50
2020	22	75	56	63	54	57	35	113	43	52
2021	22	85	63	76	64	68	48	77	51	57
2022	27	138	89	114	86	97	58	118	61	75
Rata-rata	22	92	64	80	64	69	45	105	50	57

Sumber: *ppid.bpk.go.id (data diolah peneliti, 2024)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera masih belum maksimal. Masih terdapat provinsi yang kinerja keuangan pemerintahnya lima tahun terakhir dalam kategori rendah seperti Provinsi Aceh, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung, juga terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan dan peningkatan kinerja keuangan dalam rentang 5 tahun terakhir.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tahun 2018-2022

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa (%)

Tahun	DKI Jakarta	Jabar	Jateng	D.I.Y	Jatim	Banten
2018	243	138	125	61	139	159
2019	314	144	127	58	138	169
2020	221	116	117	50	132	134
2021	183	122	124	50	125	152
2022	242	235	208	69	201	274
Rata-rata	241	151	140	58	147	177

Sumber: *ppid.bpk.go.id (data diolah peneliti, 2024)*

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa dibandingkan dengan Sumatera jauh lebih tinggi, tetapi masih ada provinsi yang kinerja keuangannya belum maksimal dan masuk kategori sedang dalam rasio kemandirian yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga mengalami penurunan kinerja keuangan setiap tahunnya dan hanya meningkat di tahun 2022. Untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten kinerja keuangan pemerintah daerahnya sudah cukup tinggi tetapi masih terjadi penurunan peningkatan setiap tahunnya.

Naik turunnya kinerja keuangan pemda dapat disebabkan berbagai faktor. Dalam studi ini variabel yang dipakai adalah penelitian Utami (2023) yang meneliti Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dalam kaitannya dengan kinerja keuangan pemda, serta Sari dan Halmawati (2022) yang meneliti Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Berdasarkan dua penelitian sebelumnya, Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal adalah tiga metrik yang diidentifikasi oleh peneliti sebagai hubungan antara kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Mamuka dkk. (2019), semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka semakin besar peluangnya untuk membangun perekonomiannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Sari dan Halmawati (2021), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berupaya untuk pemerataan anggaran daerah dan digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Menurut Nauw dan Riharjo (2021), pengelolaan belanja yang baik menghasilkan nilai uang yang baik dan memberikan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih akurat. Disparitas atau perbedaan hasil penelitian ditemukan berdasarkan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi dasar penelitian ini. Peneliti menggunakan tiga parameter dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa.

B. KAJIAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah uang yang diterima daerah yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan Daerah. Pengumpulan pos penerimaan pajak dengan pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan bukan pajak dengan pendapatan badan usaha milik daerah, penerimaan penanaman modal, dan pengelolaan sumber daya alam dikenal dengan pendapatan asli daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mengatur tentang pendapatan asli daerah. Di Indonesia, pajak dan retribusi daerah diatur dengan undang-undang ini. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi lainnya untuk mendanai pembangunan daerah dan inisiatif pemerintah. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan ini diatur bahwa PAD, yang dimaksud dengan pendapatan yang bersumber dari dalam wilayah NKRI dan merupakan hak daerah, dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah.



Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah Pusat mengalokasikan DAU kepada Pemda dengan tujuan dipergunakan untuk pelayanan masyarakat, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Agar pemerintah daerah dapat melaksanakan berbagai inisiatif dan operasional pemerintah daerah dan pembangunan, dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan yang sangat penting.

Salah satu alat kebijakan yang digunakan untuk mewujudkan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah adalah DAU, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam mendukung operasionalnya. Porsi dana alokasi umum setiap pemerintah daerah di Indonesia ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk luas daerah, kepadatan penduduk, dan tingkat kemiskinan. Agar dana alokasi umum dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, maka dana tersebut harus digunakan secara efisien dan bertanggung jawab sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah.

Belanja Modal

Belanja modal diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan nomor Peraturan Menteri Keuangan. 101/PMK.02/2011 tentang kategorisasi anggaran. Kategori-kategori ini meliputi:

1. Belanja Modal untuk Tanah
2. Penanaman Modal pada Mesin dan Peralatan
3. Struktur dan Pengeluaran Modal untuk Struktur
4. Pengeluaran Modal untuk Jaringan, Irigasi, dan Jalan
5. Pengeluaran Modal untuk Aset Tambahan
6. belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap atau aset lain yang menghasilkan manfaat selama beberapa periode akuntansi disebut sebagai belanja modal. Meningkatkan infrastruktur dan layanan publik merupakan tujuan utama belanja modal. Belanja modal mencakup perolehan, pembangunan, atau pengadaan aset lain serta aset tetap dalam rangka peningkatan fasilitas umum dan pelaksanaan tugas administratif.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian Saputri dan Kurnia (2020) derajat pencapaian pekerjaan di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya disebut dengan kinerja keuangan daerah.

Utami (2023) mengatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan rasio keuangan APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Pemerintah menggunakan analisis rasio keuangan untuk membandingkan elemen dalam laporan keuangan untuk menentukan pola dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah daerah menggunakan berbagai rasio kinerja keuangan, termasuk rasio kemandirian, desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Rasio kemandirian merupakan rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio yang digunakan untuk membandingkan jumlah PAD dan Pendapatan Transfer disebut rasio kemandirian. Jika rasio yang dihasilkan mencapai 100%, maka kinerja keuangan pemda dianggap mandiri; semakin tinggi rasio kemandirian yang dihasilkan maka semakin baik kinerja keuangan daerah.

Hipotesis Penelitian

Dampak PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa

Menurut penelitian Sari dan Halmawati (2021), PAD yang dihasilkan daerah secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingginya PAD yang dapat dihasilkan akan mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari sumber pusat, menurut Prastiwi dan Aji (2020). Menurut Verawaty dkk. (2020), daerah dengan PAD tinggi biasanya mempunyai hasil keuangan yang lebih baik. Hipotesis tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut, dengan memperhatikan landasan teori di atas:

H1: PAD berdampak terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa.

Dampak DAU terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa

DAU ialah dana transfer yang disalurkan kepada pemda oleh pempus untuk memenuhi kebutuhannya, maka terdapat hubungan antara kinerja keuangan pemerintah daerah dengan DAU. Penegasan tersebut sejalan dengan penelitian Budianto & Alexander (2022) yang berpendapat bahwa ketergantungan pemda terhadap pempus akan semakin meningkat seiring dengan besarnya dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat, sehingga pada akhirnya menyebabkan menurunnya kinerja keuangan pemerintah. Hipotesis tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut, dengan memperhatikan landasan teori di atas:

H2: DAU berdampak terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa.

Dampak Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa

Belanja modal yang besar merupakan gambaran dari luasnya bangunan dan fasilitas yang dibangun untuk mendukung ekspansi perekonomian. Pertumbuhan kinerja keuangan daerah akan meningkat berbanding lurus dengan besarnya pembangunan yang dilakukan (Asnidar dan Hardi 2019). Hipotesis tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut, dengan memperhatikan landasan teori di atas:

H3: Belanja Modal berdampak terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa.

Dampak PAD, DAU dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa

Tujuan dalam hal ini adalah untuk mengetahui dampak PAD, DAU, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemda di Sumatera dan Jawa. Dengan demikian, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut

H4: PAD, DAU, dan Belanja Modal secara bersamaan berdampak pada Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode temuan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada temuan ini yaitu dengan mengolah data sekunder. Data tersebut berupa LRA Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera dan Jawa tahun 2018-2022. Dalam penelitian ini variabel



independen yaitu PAD (X1), DAU (X2), dan Belanja Modal (X3) sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemda (Y). Kemampuan finansial suatu daerah dapat ditunjukkan dari PADnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi meningkat seiring dengan kontribusi PAD (Mahmudi, 2019). Mengingat DAU ialah bagian dari pendapatan transfer pempus, maka hal ini dapat menunjukkan tingkat ketergantungan suatu daerah. Dengan membagi total pendapatan daerah dengan jumlah uang transfer yang diterima pendapatan daerah, maka dapat diketahui derajat ketergantungan keuangan suatu daerah. Menurut Mamuka, dkk. (2019) Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang telah ada sehingga memberikan manfaat tersendiri pada periode tertentu. Pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi mempunyai porsi belanja modal yang lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah. Dalam penelitian Saputri dan Kurnia (2020) Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat capaian dari suatu pekerjaan dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditentukan sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 10 prov. di Sumatera dan 6 prov. di Jawa dijadikan sebagai populasi penelitian. Tahun observasi penelitian adalah 2018–2022. Purposive sampling, dengan kriteria

1. Provinsi di Sumatera dan Jawa
2. Laporan Realisasi Anggaran lengkap dan mempunyai PAD, DAU, dan Belanja Modal Tahun 2018-2022.

Dalam penelitian ini, diidentifikasi satu dari enam belas provinsi yang tidak dapat dijadikan sampel. Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai Dana Alokasi Umum karena merupakan daerah infanteri yang mempunyai ciri khusus dan wilayah yang lebih luas dan otonomi dibandingkan daerah lainnya. Sampel yang digunakan dalam temuan ini hanya 15 dari 16 prov. Di Sumatera dan Jawa

Teknik dokumentasi digunakan dalam temuan ini untuk mengumpulkan semua data sekunder. Untuk itu, data LRA Tahun 2018–2022 diunduh dari website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK RI (<https://e-ppid.bpk.go.id/>).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi data panel. Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data adalah dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasi data, menyajikan data dari masing-masing variabel dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Analisis dalam temuan ini meliputi analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Analisis data dan pengujian hipotesis dapat menggunakan bantuan program Eviews 12, data dan pengujian hipotesis dapat menggunakan bantuan program Eviews 12

D. HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan penjelasan mengenai nilai rerata (mean), nilai minimum, nilai maksimum atas data variabel penelitian varia bel independen maupun variabel dependen, hingga bisa dijelaskan karakteristik data yang ada dengan menjelaskan besaran nilai tersebut. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang

digunakan adalah kinerja keuangan pemda (Y), sedangkan variable independennya adalah PAD (X1), DAU (X2), dan Belanja Modal (X3).

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	0,431733	0,219200	0,159600	0,881067
Median	0,400000	0,190000	0,160000	0,690000
Maximum	0,730000	0,460000	0,270000	2,740000
Minimum	0,160000	0,080000	0,050000	0,200000
Std.Dev.	0,129650	0,100791	0,054684	0,503540
Skewness	0,133083	0,612390	-0,067508	1,311990
Kurtosis	2,534126	2,462936	2,148314	4,935310
Jarque-Bera	0,899634	5,589129	2,323746	33,22092
Probability	0,637745	0,061141	0,312900	0,000000
Sum	32,380000	16,440000	11,970000	66,080000
Sum Sq. Dev.	1,243875	0,751752	0,221288	18,76291
Observations	75	75	75	75

Sumber: hasil pengelolaan Eviews12 (2024)

Analisis Seleksi Data Panel

Uji Chow

Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model adalah tiga metode yang digunakan dalam pemilihan model data panel. Teknik model terbaik di antara ketiganya harus dipilih untuk menafsirkan temuan analisis. Pemilihan data panel yang meliputi uji pengali Chow, Hausman, dan Lagrange digunakan untuk memilih ketiga model tersebut.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2,890250	(14,57)	0,0024
Cross-section Chi-square	40,231999	14	0,0002

Sumber: hasil pengelolaan Eviews12 (2024)

Berdasarkan table hasil uji chow bahwa nilai probability Cross-section Chi-square sebesar 0,0002 yang nilainya < 0,05 maka menerima H1 dengan hipotesis:

H0 : Common Effect Model

H1 : Fixed Effect Model

Sehingga dapat disimpulkan bahwa **Fixed Effect Model** lebih tepat dibandingkan dengan Common Effect Model.

Uji Hausman

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2,090365	3	0,5539

Sumber: hasil pengelolaan Eviews12 (2024)

Berdasarkan table hasil uji hausman bahwa nilai Probability Cross-section random sebesar 0,5539 yang nilainya > 0,05 maka menerima H0 dengan hipotesis:



H0 : Random Effect Model
 H1 : Fixed Effect Model

Sehingga dapat disimpulkan bahwa **Random Effect Model** lebih tepat dibandingkan dengan Fixed Effect Model.

Uji Langrange Multiplier

	Hasil Uji Langrange Multiplier		
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	8,665007 (0,0032)	0,075623 (0,7833)	8,740630 (0,0031)
Honda	2,943638 (0,0016)	-0,274996 (0,6083)	1,887015 (0,0296)
King-Wu	2,943638 (0,0001)	-0,274996 (0,6083)	1,145120 (0,1261)
Standardized Honda	3,735587 (0,0001)	0,144635 (0,4425)	-0,924347 (0,8223)
Standardized King-Wu	3,735587 (0,0001)	0,144635 (0,4425)	-1,369822 (0,9146)
Gourie roux, et al.	-	-	8,665007 (0,0049)

Sumber: hasil pengelolaan Eviews12 (2024)

Berdasarkan table hasil uji lagrange multiplier bahwa nilai *Probability Breusch-Pagan* sebesar $0,0032 < 0,05$ maka menerima H1 dengan hipotesis :

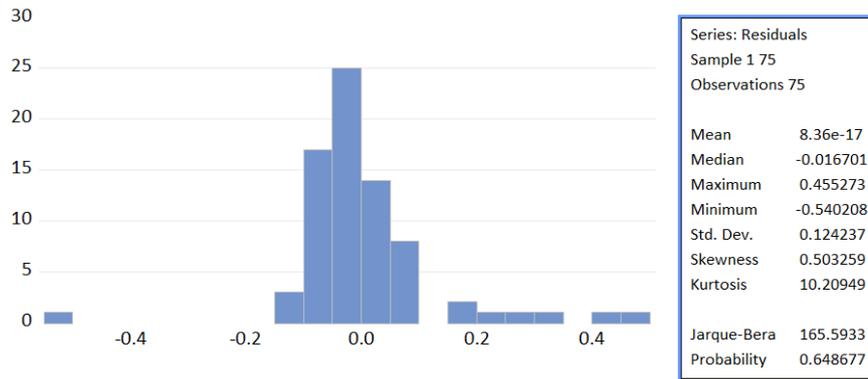
H0 : *Common Effect Model*
 H1 : *Random Effect Model*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa **Random Effect Model** lebih tepat dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

Didasarkan ketiga pengujian diatas, penggunaan *Random Effect Model* terpilih sebanyak dua kali yaitu pada Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan model terbaik yang digunakan untuk menentukan Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa Tahun 2018-2022 adalah **Random Effect Model (REM)**.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan metode grafik histogram dan uji statistik Jarque-Bera (JB test) dapat dilihat pada gambar berikut :



Grafik Histogram dan Uji Statistik JB test

Sumber : hasil pengelolaan Eviews 12 (2024)

Uji normalitas memiliki nilai probability $0,648677 > 0,05$ maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0,017029	79,39367	NA
X1	0,003176	13,28422	1,572561
X2	0,001347	18,02784	1,394108
X3	0,002022	3552649	1,420497

Sumber: hasil pengelolaan Eviews12 (2024)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien antar variabel $< 0,90$. maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis : Homoskedasticity

F-statistic	0,963519	Prob. F(3,71)	0,4148
Obs*R-squared	2,933959	Prob. Chi-Square(3)	0,4019
Scaled explained SS	12,10748	Prob. Chi-Square(3)	0,0070

Sumber: hasil pengelolaan Eviews12 (2024)

Berdasarkan table uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa nilai Probability Chi-Square sebesar $0,4019 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pemilihan model estimasi persamaan regresi dengan uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*, maka terpilihlah *Random Effect Model* (REM) untuk persamaan regresi linear data panel.

Regresi *Random Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,858823	0,190314	-4,512668	0,0000
X1	3,805347	0,263887	14,42035	0,0000
X2	-0,219363	0,374000	-0,586533	0,5594
X3	0,909015	0,452502	2,008865	0,0484

Sumber: hasil pengelolaan Eviews12 (2024)

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diperoleh nilai variabel X1 sebesar 3,805347, X2 sebesar -0,219363, X3 sebesar 0,909015, dan nilai konstanta sebesar -0,858823, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0,858823 + 3,805347X_1 - 0,219363X_2 + 0,909015X_3$$

Berdasarkan model regresi diketahui nilai konstanta adalah -0,858823, yang mengindikasikan apabila variabel independen memiliki nilai 0, maka Kinerja keuangan pemda bernilai negatif 0,858823. Koefisien variabel X1 sebesar 3,805347, X2 sebesar -0,219363, X3 sebesar 0,909015,. Hal ini berarti setiap peningkatan 1 satuan dari X1 akan menaikkan Y sebesar 3,805347, sedangkan X2 akan menurunkan nilai Y sebesar 0,219363, dan peningkatan 1 satuan dari X3 akan menaikkan nilai Y 0,909015, dengan mengasumsikan bahwa variabel bebas lainnya memiliki nilai tetap.

Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R2)

Hasil Uji R2

R - squared	0,805632
Adjusted R - squared	0,797419
S.E. Of regression	0,151393
F - statistic	98,09542
Prob (F- statistic)	0,000000

Sumber: hasil pengelolaan Eviews12 (2024)

Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,797419 yang menunjukkan kontribusi pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal adalah sebesar 79,7%. Sisanya sebesar 20,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,858823	0,190314	-4,512668	0,0000
X1	3,805347	0,263887	14,42035	0,0000
X2	-0,219363	0,374000	-0,586533	0,5594
X3	0,909015	0,452502	2,008865	0,0484

Sumber: hasil pengelolaan Eviews12 (2024)

Nilai t-hitung untuk Pendapatan Asli Daerah $14,42035 > 1,992997$ dan signifikasinya sebesar $0,0000 < 0,05$, artinya H1 diterima, Sementara pada Dana Alokasi Umum $-0,586533 < 1,992997$ dan signifikasinya $0,5594 > 0,05$, artinya H2 ditolak. Belanja Modal nilai t-hitungnya $2,008865 > 1,992997$ dan signifikasinya $0,0484 < 0,05$, artinya H3 diterima, dengan nilai t-tabel pada 95%, α 5% dan $n-2$ atau $75-2= 73$ sebesar $1,992997$ dengan tingkat signifikansi $0,0000$. Berdasarkan penjelasan tersebut, PAD dan Belanja Modal memiliki dampak, sedangkan DAU tidak memiliki dampak terhadap Kinerja Keuangan Pemda.

Uji Signifikasi secara bersama (Uji Statistik F)

Hasil Uji Statistik F

R - squared	0,805632
Adjusted R - squared	0,797419
S.E. Of regression	0,151393
F - statistic	98,09542
Prob (F- statistic)	0,000000

Sumber: hasil pengelolaan Eviews12 (2024)

Pada tabel hasil uji statistik F, nilai f-hitung $98,09542 > f$ -tabel pada 95%, α 5% dan $4 - 1$ dan $n - 4$ sebesar $2,733647$ dengan tingkat sig $0,000$. Secara statistik berarti H_0 diterima dan H_a diterima, yang berarti secara bersamaan PAD (X1), DAU (X2), dan Belanja Modal (X3) berdampak dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemda (Y).

E. PEMBAHASAN

Dampak PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa

Hasil pengujian variabel PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemda sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian. Pada hasil uji regresi linear berganda, tingkat signifikansi variabel PAD lebih kecil dari alpha ($0,05$) yaitu sebesar $0,000$ ($0,000 < 0,05$), yang berarti bahwa variabel PAD berdampak dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari dan Halmawati (2021) bahwa PAD yang dihasilkan daerah mempunyai andil penting dalam menumbuhkan kinerja keuangan pemda. PAD yang tinggi dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan kemandirian fiskal, kemampuan pembiayaan pembangunan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, kualitas layanan publik, dan stabilitas keuangan daerah. Oleh sebab itu,



pemda perlu fokus pada peningkatan PAD melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, perbaikan sistem perpajakan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Dampak DAU terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa

Hasil pengujian variabel DAU terhadap kinerja keuangan pemda tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian. Pada uji linear berganda, menunjukkan tingkat signifikansi DAU lebih besar dari alpha (0,05) yaitu sebesar 0,5594 ($0,5594 > 0,05$) yang berarti DAU tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiranda dan Gideon (2022) bahwa DAU secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. DAU membantu menstabilkan keuangan daerah, meningkatkan kapasitas fiskal, meningkatkan kualitas layanan publik, mendukung pelaksanaan desentralisasi, dan memperkuat efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan. Namun, untuk memaksimalkan manfaat DAU, pemda perlu memajukan kapasitas administrasi dan pengelolaan keuangan serta berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada dana alokasi umum dengan meningkatkan PAD mereka sendiri.

Dampak Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa

Hasil pengujian variabel belanja modal terhadap kinerja keuangan pemda sesuai dengan hipotesis dalam penelitian. Berdasarkan uji linear berganda, menunjukkan tingkat signifikansi belanja modal lebih besar dari alpha (0,05) yaitu sebesar 0,0484 ($0,0484 < 0,05$) yang berarti belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mustanda (2019) secara parsial belanja modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal yang direncanakan dan dikelola dengan baik dapat berkontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menciptakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PAD, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, untuk memaksimalkan manfaat belanja modal pemerintah daerah harus memastikan perencanaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja modal.

Dampak PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa

Tabel hasil uji statistik f menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai f-hitung 98,09542 lebih besar dari f-tabel 2,733647. Yang berarti hasil pengujian sesuai dengan hipotesis bahwa PAD, DAU, dan belanja modal secara bersamaan berdampak pada kinerja keuangan pemda Sumatera dan Jawa pada tahun anggaran 2018–2022. Kinerja keuangan pemda meningkat seiring dengan peningkatan PAD, DAU dan belanja modal. Hal ini karena ketiga variable memainkan peran yang signifikan sebagai sumber pembiayaan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data diatas, Karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemda Sumatera dan Jawa dipengaruhi dan signifikan oleh PAD dan Belanja Modal. Sebaliknya, DAU tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda di Sumatera dan Jawa. Fokus penelitian yang dilakukan ini hanya pada pemda provinsi di Sumatera dan Jawa, sehingga hasilnya tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan yang berlaku bagi semua pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, keterbatasan pada penelitian ini karena hanya mencakup 5 tahun yaitu tahun 2018-2022. Menurut temuan ini, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan nasional, pemda Sumatera dan Jawa diharapkan dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan PAD yang berasal dari pajak dan retribusi, ini akan memungkinkan pemda untuk kemudian dapat membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Dengan mengelola keuangan mereka sendiri, pemda di Sumatera dan Jawa dapat mengurangi ketergantungannya terhadap dana transfer seperti DAU, dengan berkurangnya ketergantungan terhadap pempus, pemda dapat melakukan pembangunan sendiri. Untuk meningkatkan kinerja keuangan, pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa harus meningkatkan alokasi belanja modal mereka terhadap total belanja, dan alokasi belanja tersebut harus dilakukan secara efisien dan transparan. Pada temuan berikutnya diharapkan dapat memilih variabel independen lainnya selain yang digunakan pada temuan ini antara lain pendapatan transfer, dana perimbangan, belanja daerah dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnidar. Sintia Hardi, Novia. (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudera Ekonomika, Vol. 3 No.* Fakultas Ekonomi Universitas Samudra.
- Mahmudi.(2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* . Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mamuka, Kartini Katrina. Ita Pingkan F. Rorong, Jacline I. Sumual. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.19 No.03. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 19 No.3.* Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
- Nauw, E. T. Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 10 No.6.* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomika Indonesia, Surabaya.
- Prastiwi, Nanda Dipa. Aji, Andri Waskita. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota Di daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-



- 2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 28 No.1. ISSN : 2672-173X. Prodi Akuntansi Fe Universitas Sarjawiyata Tamansiswa.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- _____.(2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- _____.(2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran Berikutnya.Jakarta.
- Saputri. Kurnia. (2020).Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(23), 1–21. E-ISSN 2460- 0585.
- Sari, Beri Indah. Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 3 No. 1. ISSN : 2656-3649. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Sari, Ni Made Diah Permata. Mustanda, I Ketut. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 8 No.8. ISSN : 2302-8912. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Utami, Mega Harun. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021.
<https://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/handle/123456789/7509>